

ABSTRACT

Ngurah Gede Satria Aryawangsa (19/444331/SP/29135)

The increasing cases of female suicide bombers in Indonesia exemplify the changing recruitment and *jihad* tactics that terrorist groups employ. However, the change of demographics in Violent Extremism (VE) is not followed by gender-sensitive approaches in Counter Violent Extremism (CVE) policies in Indonesia, one of which includes the lack of women-led organizations' involvement. By using *post-structural feminism* by Judith Butler, this study uncovers that the presence of binary languages in the media and the state's policies contributes to the neglect of women's participation in Violent Extremism. The latter are deemed unfit to be perpetrators owing to the feminine traits that set them apart from men. As a result, there is no urgency to include women as stakeholders in CVE, given their anomaly in becoming suicide bombers. This study highlights language's power in creating hierarchical positions that determine the most suitable gender that can and will become suicide bombers. Terrorism studies and its counter efforts have become a masculinized field.

Keywords: Violent Extremism; Counter Violent Extremism; post-structural feminism; binary language.

INTISARI

Ngurah Gede Satria Aryawangsa (19/444331/SP/29135)

Peningkatan jumlah kasus perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri di Indonesia menunjukkan perubahan taktik rekrutmen dan upaya *jihad* yang dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia. Akan tetapi, perubahan demografi di *Violent Extremism* (VE) tersebut tidak diikuti dengan implementasi kebijakan anti-terorisme (CVE) di Indonesia yang menggunakan pendekatan gender, dimana salah satu permasalahan tersebut meliputi kurangnya partisipasi organisasi perempuan. Dengan menggunakan teori feminisme pasca-struktural oleh Judith Butler, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan kalimat biner di media dan kebijakan pemerintah berkontribusi terhadap pengabaian partisipasi perempuan di *Violent Extremism*. Perempuan dianggap sebagai individu yang tidak cocok mengisi profil pelaku pemboman akibat dari sifat feminin yang membedakannya dengan pria. Oleh karena itu, tidak ada urgensi untuk mengikutsertakan perempuan sebagai pemangku kepentingan di kebijakan anti-terorisme, mengingat partisipasi mereka dalam terorisme yang cenderung merupakan suatu anomaly. Penelitian ini menunjukkan peran tata bahasa dalam membuat hierarki yang menentukan gender mana yang rentan menjadi pelaku bom bunuh diri. Akibatnya, studi terrorism dan upaya pencegahannya menjadi bidang yang maskulin.

Kata kunci: Violent Extremism; Kebijakan Anti-Terrorisme; feminisme pasca-struktural; kalimat biner.